

ABSTRAK

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA SENGKETA LAHAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021

Oleh

ACHMAD ALDO SYAROZA

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang. Sengketa lahan adalah kondisi apabila seseorang tidak sepaham dalam hal pendapat mengenai tanah maka hubungan secara sosial akan memudar juga. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1 (angka 4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, menyatakan bahwa: konflik pertanahan adalah perselisihan atau pertentangan antara orang perseorangan, kelompok, golongan organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau telah berdampak luas. Salah satu contoh sengketa lahan adalah sengketa lahan pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2018/PN/Mgl, namun putusan tersebut tidak terhenti sampai dengan Tingkat Pengadilan Negeri saja melainkan adanya Upaya hukum yang di lakukan oleh Tergugat mulai dari Upaya hukum banding sampa dengan Upaya Peninjauan Kembali yaitu dala pokok perkara: Menolah Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT.HIM tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif - empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dan mengetahui akibat hukum dari putusan hakim gugatan perbuatan melawan hukum pada sengketa jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat berdasarkan permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi. Selanjutnya dilakukan pemanggilan *Aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dalam rangka teguran kepada pihak termohon eksekusi. Pada pemanggilan *Aanmaning* tersebut, pihak pengadaan tanah menyampaikan adanya perbedaan objek antara objek yang digugat dengan objek yang dipersengketakan. Berdasarkan hasil pemanggilan *Aanmaning* telah

diambil kesepakatan yaitu diadakan pemeriksaan objek melalui *constatering* (pencocokan). Akibat hukum dari gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lahan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Putusan Peninjauan Kembali Nomor 579 PK/Pdt/2021 adalah tidak bisa dilaksanakan ganti ruginya dikarenakan objek gugatan berbeda dengan objek konsinyasi Nomor 24/Pdt.Cons/2018/PN.Mgl yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Menggala.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Lahan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE EXECUTION OF THE JUDGE'S RULING REGARDING THE LAWSUIT FOR UNLAWFUL ACTS IN THE TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG TOLL ROAD LAND DISPUTE

(Study of Judicial Review Decision No. 579 PK/Pdt/2021

By

ACHMAD ALDO SYAROZA

In this study, the object of research is the land dispute over the Terbanggi Besar-Pematang Panggang toll road. Land disputes are a condition where if someone disagrees in terms of opinions regarding land then social relations will fade as well. This is reinforced by Article 1 (number 4) of the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2011 concerning Management of the Study and Handling of Land Cases, stating that: land conflict is a dispute or conflict between individuals, groups, groups of organizations, legal entities or institutions that have a tendency or have had a wide impact. One example of a land dispute is the land dispute over the Land Procurement for the Terbanggi Besar – Pematang Panggang Toll Road, namely based on the District Court Decision Number 52/Pdt.G/2018/PN/Mgl, but the decision does not stop at the District Court Level alone but there are efforts The law carried out by the Defendant starts from legal appeals up to Judicial Review Efforts, namely in the main case: Processing the Request for Judicial Review from the Petitioner for Judicial Review: PT.HIM.

This type of research is normative - empirical legal research. The type of research used in this research is descriptive legal research. The data obtained was then analyzed qualitatively. This research aims to determine the implementation of the execution and determine the legal consequences of the judge's decision regarding an unlawful act in the Terbanggi Besar-Pematang Panggang toll road dispute regarding Judicial Review Decision Number 579 PK/Pdt/2021. The research results show that the execution was carried out by the local District Court based on the execution request from the execution applicant. Next, Aanmaning was summoned by the Chairman of the Menggala District Court as a warning to the defendant for execution. In Aanmaning's summons, the land procurement party stated that there was a difference in object between the object being sued and the object in dispute. Based on the results of Aanmaning's summons, an agreement was reached, namely an inspection of the object through constating (matching).

The legal consequence of the lawsuit for unlawful acts over the Terbanggi Besar-Pematang Panggang toll road land dispute in the Judicial Review Decision Number 579 PK/Pdt/2021 is that compensation cannot be implemented because the object of the lawsuit is different from the object of consignment Number 24/Pdt.Cons/2018/PN. Mgl which has been entrusted to the Menggala District Court.

Keywords: Execution of Decisions, Unlawful Actions, Land Disputes